

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI ANGKATAN LAUT DALAM RANGKA MENINGKATKAN HUBUNGAN BILATERAL PERTAHANAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Khoirul Hadi Prayitno¹, Jales Jamca Jayamahe², Endah Palupi³

¹Politeknik Angkatan Laut, email: choirulhadi18670@gmail.com

Abstract - The defense bilateral relationship between Indonesia and South Korea has an important role in maintaining stability and security in the Southeast Asian region. In an effort to strengthen this relationship, the naval diplomacy strategy of the two countries plays a significant role. This study aims to analyze the strategy of naval diplomacy in order to improve bilateral defense relations between Indonesia and South Korea. Naval diplomacy is an important aspect in strengthening defense cooperation between countries, especially in the context of the Indonesia-South Korea bilateral relationship. This study uses the NVivo software to collect, organize, and analyze qualitative data related to the naval diplomacy strategy of the two countries. The research method used involves analysis of document content, interviews with Navy officials, and surveys of expert opinions in the field of military diplomacy. The results of this study reveal various naval diplomacy strategies that have been implemented to strengthen bilateral defense relations between Indonesia and South Korea. Some of the identified strategies include joint military training cooperation, naval exchange visits, and public diplomacy efforts to increase public understanding of the importance of this collaboration. This research also describes the important role of NVivo software in helping researchers organize and analyze complex qualitative data. By using NVivo, researchers can identify key patterns in the naval diplomacy strategy and gain deeper insights on how bilateral defense cooperation can be strengthened. The findings of this study have important implications for the development of bilateral defense relations between Indonesia and South Korea, as well as provides a broader view of the importance of military diplomacy in the context of international relations.

Keywords: Bilateral, Military Role, Police, Diplomacy, The main tool of the weapon systema.

Abstrak - Hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam upaya untuk memperkuat hubungan ini, strategi diplomasi Angkatan Laut dari kedua negara memainkan peran yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Angkatan Laut dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Diplomasi Angkatan Laut adalah aspek penting dalam memperkuat kerjasama pertahanan antar negara, terutama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data kualitatif yang berkaitan dengan strategi diplomasi Angkatan Laut kedua negara. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis konten dokumen, wawancara dengan pejabat Angkatan Laut, dan survei pendapat ahli dalam bidang diplomasi militer. Hasil penelitian ini mengungkapkan beragam strategi diplomasi Angkatan Laut yang telah diterapkan untuk memperkuat hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Beberapa strategi yang berhasil diidentifikasi termasuk kerjasama pelatihan militer bersama, pertukaran kunjungan angkatan laut, dan upaya diplomasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kerjasama ini. Penelitian ini juga menggambarkan peran penting perangkat lunak NVivo dalam membantu peneliti mengorganisir dan menganalisis data kualitatif yang kompleks. Dengan menggunakan NVivo, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola kunci dalam strategi diplomasi Angkatan Laut serta mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kerjasama pertahanan bilateral dapat diperkuat. Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan, dan juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya diplomasi militer dalam konteks hubungan internasional.

Kata Kunci: Bilateral, Peran Militer, Polisionel, Diplomasi, Alutsista.



PENDAHULUAN

Peran Militer (*Military Role*) merupakan peran utama yang mengacu kepada upaya Angkatan Laut dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer di dan/dari laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.[1] Peran Polisionil (*Constabulary Role*) dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional dan memelihara ketertiban di laut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai bagian dari TNI yang dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut telah senantiasa dan terus berupaya berperan aktif dalam menjalankan peran diplomasinya.[2][3] Kemampuan dalam diplomasi juga menjadi salah satu kemampuan yang terus dibina oleh TNI AL dalam rangka melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai kemungkinan ancaman sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Kemampuan diplomasi adalah kemampuan menyampaikan pesan kebijakan kepada sasaran yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AL dan kehadiran alut sista di laut (*naval presence*) yang mengemban tugas-tugas diplomasi yaitu penangkalan (*deterrence*), pengumpulan data (*picture building*) dan menciptakan kesepahaman (*confidence building*). TNI AL juga telah menjabarkan upaya penguatan diplomasi Angkatan Laut melalui berbagai penyusunan program prioritas dalam pencapaian tugas TNI AL.[4]

Penguatan diplomasi juga dilaksanakan dengan penyusunan dan penandatanganan dokumen *Defense Cooperation Agreement* (DCA) antar Kementerian Pertahanan maupun dengan Angkatan Bersenjata negara lain yang telah memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI dan TNI AL.[5] Penandatanganan dokumen DCA mampu menjadi peluang dan dapat membuka akses dalam pelaksanaan dialog lanjutan yang dapat meningkatkan pembangunan TNI AL diantaranya berupa *capacity building*, pelatihan dan latihan bersama. Peningkatan diplomasi disamping bermanfaat dalam pembangunan kekuatan matra laut, juga dapat dimanfaatkan dalam merubah cara pandang negara lain terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia diantaranya terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan (*South Pacific*).[6] TNI AL juga berupaya melakukan penguatan diplomasi Angkatan Laut dalam kegiatan berbasis *sharing knowledge* diantaranya dengan penyelenggaraan *Forum Group Discussion* (FGD) dan seminar (*International Maritime Security Symposium*) dalam pembahasan isu luar negeri.[7] Berbagai kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya akan mampu menunjukkan peran strategis TNI AL dalam menjalankan fungsi diplomasinya. Dalam rangka melaksanakan peran diplomasinya, TNI AL juga telah melakukan berbagai kerja sama dengan Angkatan Laut negara sahabat khususnya negara-negara maju yang dapat memberikan keuntungan bagi *capacity building* TNI AL, baik secara bilateral maupun multilateral.

Kerjasama bilateral yang selama ini telah terbukti dan sangat potensial dalam mendukung pengembangan kekuatan TNI AL yaitu kerjasama dengan Angkatan Laut Korea Selatan (AL Korsel)/*The Republic of Korean Navy* (RoKN).[8] TNI AL melakukan pengadaan sejumlah alut sista buatan galangan kapal/*shipyard* Korsel dimana dalam penyiapan dan *crew training*, telah melibatkan personel AL Korsel dalam memfasilitasi pelatihan sebelum personel TNI AL mengawaki kapal dan melaksanakan pelayaran penyeberangan kapal ke tanah air. Kedua negara terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama baik secara bilateral, regional maupun multilateral.[9] Kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel merupakan kerja sama yang strategis dalam pembinaan kemampuan personel dan khususnya peningkatan kekuatan tempur TNI AL dengan mengingat bahwa beberapa produk alutsista produksi galangan Korsel telah digunakan

oleh TNI AL dalam memperkuat jajaran alutsista.[10] Saat ini industri pertahanan (indhan) Korsel telah berevolusi secara *massive* dengan telah mampu memproduksi peralatan tempur secara mandiri melalui modernisasi dan reformasi militer. Indhan Korsel dalam dekade terakhir telah bertransformasi menjadi kekuatan industri pertahanan yang besar sehingga selain mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga kerja sama yang efektif akan dapat meningkatkan kemampuan personel secara lebih maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas, khususnya dalam upaya mengoptimalkan *transfer of technology* saat pengadaan alutsista.[11]

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertindak sebagai instrumen utama adalah peneliti sendiri.[12][13] Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian mengacu kepada panduan pertanyaan yang disiapkan. [14] Kegiatan wawancara dilaksanakan secara terstruktur baik secara lisan maupun tertulis. Dari kegiatan wawancara langsung selanjutnya dianalisis menggunakan software Nvivo 12.[15] Ada pun subjek penelitian dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu regulator, operator dan pengamat. Regulator merupakan pihak yang membuat kebijakan, sedangkan operator adalah pihak yang bertindak selaku pelaksana dari kebijakan. Pengamat adalah pihak di luar regulator dan operator yang memiliki pengetahuan terkait penelitian yang dilaksanakan.

1. Pembuat Kebijakan (Regulator)

Dalam konteks Kemenhan, Menteri Pertahanan juga memiliki peran dalam kebijakan kerja sama dengan Kemenhan negara sahabat. Kerja sama yang dilakukan oleh Ditkersinhan Kemenhan RI berada dalam pengawasan Direktorat Strategi Pertahanan/Ditjen Strahan Kemenhan RI. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menempatkan Ditjen Strahan Kemenhan sebagai regulator. Ditjen Strahan Kemenhan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemenhan yang membawahi empat Direktorat, salah satunya adalah Ditkersinhan yang saat ini menjabat sebagai Dirkersinhan. Namun karena keterbatasan waktu penelitian dan kegiatan dari Dirkersinhan maka untuk kegiatan wawancara dilaksanakan terhadap Kasubdit Asia Ditkersinhan. Kebijakan yang berkaitan dengan kerja sama di lingkungan TNI menjadi wewenang Panglima TNI sesuai dengan pertimbangan perkembangan lingkungan strategis baik secara global, regional, maupun nasional. Panglima TNI membentuk Pusat Kerjasama Internasional (Puskersin) TNI sebagai Badan Pelaksana Pusat/Balakupus TNI dalam rangka membantu merumuskan kebijakan, mengorganisasikan kegiatan kerjasama internasional di lingkungan TNI. Puskersin TNI. Namun karena keterbatasan waktu penelitian dan kegiatan dari Kapuskersin dan Kabid Kerma Non ASEAN maka untuk kegiatan wawancara yang membidangi kerjasama Non ASEAN.

2. Pelaksana Kebijakan (Operator)

Subjek penelitian yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan dalam kegiatan kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel adalah staf Kepabanan V/ Straops Sopsal dan Staf Kepabanan IV/Hublu Sintelal.

3. Pelaksana Kebijakan (Operator)

Pengamat merupakan pihak yang memiliki pengetahuan terkait kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel. Para pengamat umumnya tidak/sudah tidak terlibat langsung dalam kegiatan kerja sama, namun mereka mempunyai pengalaman terkait kegiatan kerja sama antara kedua instansi tersebut. Pengamat yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah mantan Athan RI di Seoul.

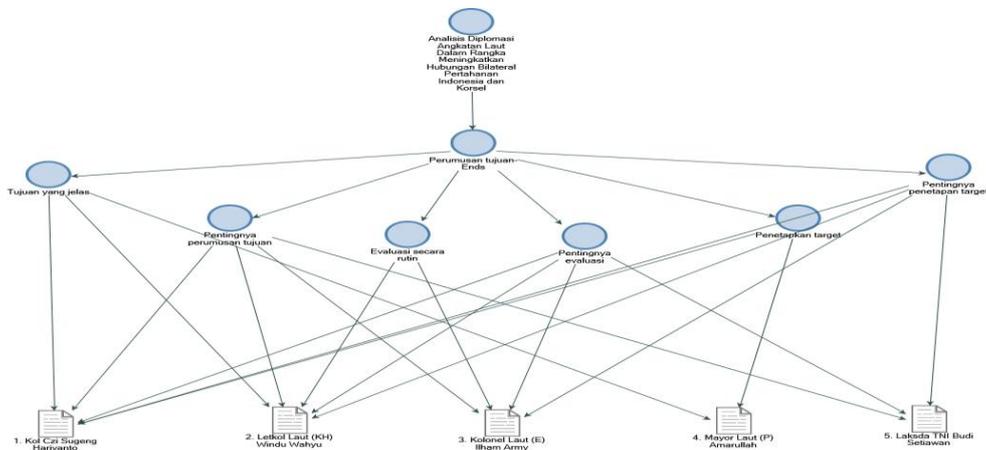


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data

Peneliti mengklasifikasikan data hasil penelitian berdasarkan peran narasumber menjadi tiga kelompok besar, yaitu regulator (pembuat kebijakan), operator (pelaksana kebijakan) dan pengamat (pihak yang dianggap mengerti tentang objek yang diteliti). Pengklasifikasian dimaksudkan agar memudahkan peneliti dalam membuat analisis data. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber adalah sebagai berikut:

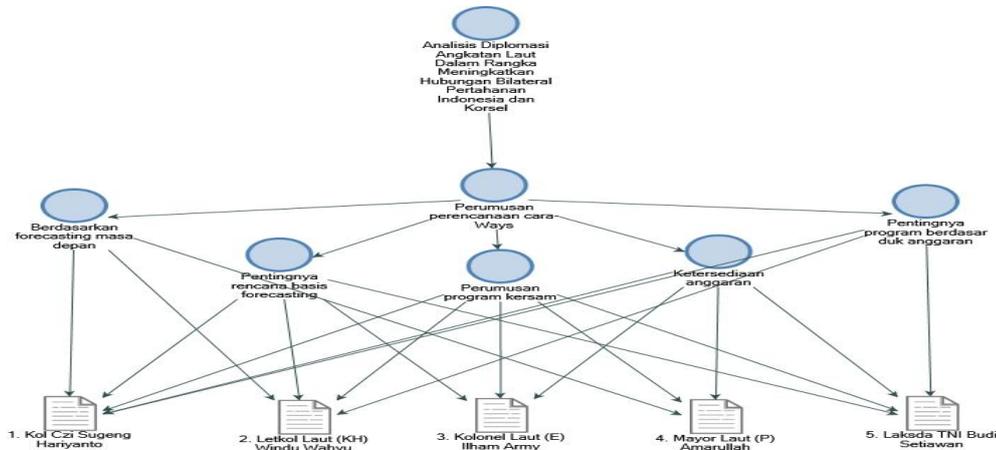
a. Pertanyaan Penelitian I : Perumusan tujuan/ends dari kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel saat ini



Sumber: Hasil olah data peneliti

Gambar 1. Project Maps Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian I dan Panduan Pertanyaan Wawancara

b. Pertanyaan Penelitian II : Bagaimana perumusan perencanaan cara/Ways dalam kerja sama TNI AL dengan AL Korsel .

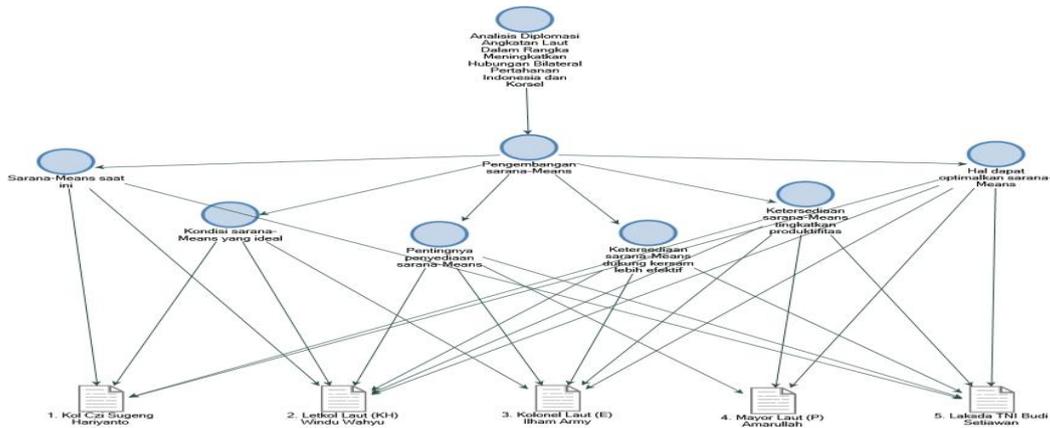


Sumber: Hasil olah data peneliti

Gambar 2. Project Maps Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian II dan Panduan Pertanyaan Wawancara



c. Pertanyaan Penelitian III : Bagaimana pengembangan sarana/*Means* dalam melaksanakan diplomasi Angkatan Laut..



Sumber: Hasil olah data penelit

Gambar 3. Project Maps Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian III dan Panduan Pertanyaan Wawancara

2. Pembahasan dan Interpretas

Berdasarkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis, maka akan dapat diketahui bagaimana penerapan strategi diplomasi Angkatan Laut dalam kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, strategi dalam kerja sama akan dilihat dari tiga aspek yaitu perumusan tujuan/*Ends*, perencanaan kerja sama/*Ways*, serta perencanaan sarana/*Means* dalam mendukung kerja sama

a. Perumusan Tujuan/*Ends*

1) Kejelasan Tujuan/*Ends*

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa tujuan kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel adalah dilatarbelakangi oleh rasa saling membutuhkan dan didasari hubungan yang telah terjalin sejak lama serta hubungan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang telah berada pada level *special strategic partnership*. Bagi TNI AL, kerjasama dengan AL Korsel memiliki tujuan yang sangat spesifik dalam rangka pengembangan personel TNI AL diantaranya dengan kerjasama dalam pendidikan dan latihan. Dengan AL Korsel yang telah dilengkapi dengan peralatan berteknologi tinggi, maka pengalaman dan pengetahuan tersebut dapat diserap dan menjadi referensi bagi pengembangan organisasi TNI AL.

2) Evaluasi Tujuan Kerjasama.

Untuk mengetahui suatu tujuan telah dicapai atau belum maka diperlukan langkah-langkah evaluasi. Berdasarkan hasil analisis data, evaluasi tujuan kerja sama dengan AL telah dilakukan oleh TNI dan TNI AL dengan adanya personel yang membidangi dalam evaluasi kegiatan meskipun evaluasi yang dilaksanakan masih bersifat rutin dan kurang lengkap. Berdasarkan analisis di atas, evaluasi yang telah dilaksanakan belum untuk melihat pencapaian tujuan namun lebih kepada



Perencanaan mengandung berbagai program yang harus dilaksanakan, tidak terkecuali dalam kerja sama antara TNI AL dengan AL Korsel. Program-program tersebut dapat disusun berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan dihadapkan dengan potensi apa saja yang dapat diserap dari AL Korsel dalam rangka pengembangan organisasi TNI AL. Program tersebut dapat meliputi aspek pendidikan, latihan dan operasi dimana dengan AL Korsel yang dilengkapi dengan alat sista bertehnologi tinggi dengan didukung sebagai aliansi AS maka menjadi peluang untuk mampu menyerap berbagai hal, khususnya yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari AS.

c. Anggaran kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, tentu harus dibarengi dengan perencanaan anggaran. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, meskipun anggaran kerja sama TNI AL dengan AL Korsel telah disesuaikan dengan perencanaan namun masih adanya beberapa program yang tidak tercantum dalam rencana pendidikan tahunan yang berdampak pada dukungan bagi personel yang terlibat. Kendala dukungan tersebut akan berimplikasi pada pencapaian *output* dari kegiatan yang dilaksanakan



Sumber: Hasil olah data peneliti
Gambar 5. Word Cloud Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian II dan Panduan Pertanyaan Wawancara

c. Perencanaan Sarana/*Means* yang mendukung kerja sama

1) Pengembangan Sarana/*Means*

Pemenuhan atas kebutuhan sarana/*means* dalam rangka kerjasama luar negeri menjadi hal utama yang harus dipenuhi, terlebih jika telah terjalin kerjasama dengan banyak negara sehingga perlu dilaksanakan pengembangan sarana yang dibutuhkan. Pengembangan sarana tersebut sebagai bentuk fleksibilitas dimana organisasi harus mampu terus berubah dan menyesuaikan dengan dinamisnya tugas dan tanggung jawab kedepannya. Dengan peran diplomasi TNI AL yang semakin kompleks kedepan dihadapkan dengan tuntutan untuk mampu menjalin hubungan bilateral yang semakin erat dengan banyak negara maka perlu dilaksanakan asesmen terhadap kebutuhan sarana guna mendukung pencapaian atas tugas yang diberikan.

Role), peran polisionil (*Constabulary Role*) dan peran Diplomasi (*Diplomacy Role*). Peran militer melibatkan persiapan kekuatan militer untuk pertahanan negara, penangkalan ancaman militer di laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, dan melindungi perbatasan laut dengan negara tetangga. Sementara peran polisionil berkaitan dengan penegakan hukum di laut, perlindungan sumber daya dan kekayaan laut nasional, serta menjaga ketertiban di laut. Diplomasi juga menjadi elemen penting dalam peran TNI AL, dengan kemampuan diplomasi yang terus ditingkatkan. Diplomasi TNI AL melibatkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kehadiran alutsista di laut untuk mencapai tujuan seperti penangkalan ancaman, pengumpulan informasi, dan menciptakan kesepahaman dengan pihak lain. TNI AL telah melakukan berbagai upaya penguatan diplomasi, termasuk penandatanganan dokumen *Defense Cooperation Agreement* (DCA) dengan negara-negara sahabat dan maju. Ini membuka peluang untuk kerja sama dalam *capacity building*, pelatihan, dan latihan bersama, yang mendukung pengembangan kemampuan TNI AL.

Kerja sama yang strategis adalah dengan Angkatan Laut Korea Selatan (AL Korsel), yang telah membantu TNI AL dalam pengadaan alutsista dan pelatihan personel. Kerja sama ini menjadi penting dalam peningkatan kemampuan TNI AL, khususnya dalam pengoptimalan transfer teknologi saat pengadaan alutsista. Dalam rangka mencapai tujuan diplomasi ini, TNI AL juga terlibat dalam berbagai kegiatan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan seminar *International Maritime Security Symposium*. Semua upaya ini mendukung peran strategis TNI AL dalam menjalankan fungsi diplomasi, yang tidak hanya memperkuat keamanan dan kedaulatan nasional di laut, tetapi juga memberikan kontribusi pada stabilitas kawasan maritim dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Sinergi antara peran militer, peran polisionil, dan diplomasi TNI AL sangat penting dalam mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Mustari, Supartono, and R. Barnas, "Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *J. Prodi Strateg. Perang Semesta*, vol. 4, no. 2, pp. 17–36, 2018.
- [2] G. Inri Fidelia Kasenda, S. Pantja Djati, and U. Pertahanan, "Analisis Profesionalisme Prajurit Tni Angkatan Laut Dalam Mendukung Pertahanan Negara Di Komando Armada I," *Manaj. Pertahanan J. Pemikir. dan Penelit. Manaj. Pertahanan*, vol. 6, no. 2, p. 108, 2020, [Online]. Available: <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/631>
- [3] R. D. Louhenapessy and I. N. Raspati, "Analisis Diplomasi Maritim Tni Angkatan Laut Di Laut," *J. Manaj. Dirgant.*, vol. 14, no. 2, pp. 204–210, 2021.
- [4] P. M. Dunia, "Optimalisasi Diplomasi Tni Angkatan Laut Dalam Mendukung Kebijakan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *J. Ilmu Pengetah. Sos. available*, vol. 9, no. 1, pp. 151–159, 2022.
- [5] J. Milia, Y. Kurniawan, and W. Poespitohadi, "Analysis of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia and Singapore in 2007–2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable," *J. Pertahanan*, vol. 4, no. 2, p. 104, 2018, doi: 10.33172/jp.v4i2.283.
- [6] A. R. Putra, "Indonesia Participation in Defense Diplomacy for Maritime Security in Southeast Asia (A Study of Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia)," *J. Prodi Diplomasi Pertahanan*, vol. 3, no. 2, pp. 1–16, 2017.
- [7] D. Prihartono, "Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara," *J. kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, pp. 5883–5890, 2022.

- [8] T. Sirmareza, "Aplikasi Soft System Methodology dalam Analisis Diplomas Angkatan Laut Indonesia melalui Pengiriman Satgas Maritim TNI Pada Misi UNIFIL MTF," *Glob. J. Polit. Int.*, vol. 19, no. 1, p. 58, 2017, doi: 10.7454/global.v19i1.122.
- [9] T. Prasetyo, A. Armawi, and D. A. Salim, "Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerjasama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut," *J. Ketahanan Nas.*, vol. 23, no. 1, p. 86, 2017, doi: 10.22146/jkn.17958.
- [10] G. E. Saputro and J. Barat, "Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia Dan Korea," *J. Educ. Dev.*, vol. 10, no. 2, pp. 227–234, 2022, [Online]. Available: <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3641%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3641/2398>
- [11] W. Darmawan, J. Alkadrie, and A. Sudirman, "Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia," *Padjadjaran J. Int. Relations*, vol. 1, no. 4, p. 303, 2020, doi: 10.24198/padjir.v1i4.26242.
- [12] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33, p. 81, 2019, doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- [13] M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. J. Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul J. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 974–980, 2022, doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- [14] Y. Afiyanti, "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif," *J. Keperawatan Indones.*, vol. 12, no. 2, pp. 137–141, 2008.
- [15] F. Soehardi, L. D. Putri, and M. Dinata, "NVivo Software Training for Young Researchers," *Mattawang J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 8–13, 2021, doi: 10.35877/454ri.mattawang265.